

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

by Sri Isnowati

Submission date: 12-Feb-2024 01:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2292635679

File name: Pemerintah_Daerah_Kabupaten_dan_Kota_di_Provinsi_Jawa_Tengah.pdf (239.68K)

Word count: 4593

Character count: 29097

52

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Pratama Puji Widiyanto, Sri Isnowati ✉

Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang

16

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, keserasian belanja operasi dan keserasian belanja modal. Objek penelitian ini terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan melihat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan secara online untuk kemudian dilakukan perhitungan statistik menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja modal. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah dan keserasian belanja operasi. Implikasi dari penelitian ini agar mendorong pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan potensi sumber daya daerah dan penguatan kemandirian keuangan.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah; Kinerja Keuangan; Pandemi Covid-19; Pemerintah Daerah

Abstrack

This study aims to determine and analyze the financial performance of local governments before and during the Covid-19 pandemic by calculating the ratio of regional financial independence, fiscal decentralization, effectiveness of regional original income, regional financial efficiency, harmony of operating expenditures and harmony of capital expenditures. The object of this study consisted of 29 regencies and 6 cities in Central Java Province, by looking at the regional income and expenditure budget realization reports published by Ministry of Finance online to then carry out statistical calculating using Eviews 12. The results of this study indicate that there is a significant difference between the financial performance of local governments before and during the Covid-19 pandemic in terms of regional financial efficiency ratios and the harmony of capital expenditures. However, there is no significant difference in terms of the ratio of regional financial independence, fiscal decentralization, effectiveness of regional original revenues and the harmony of operating expenditures. The implications of this research are to encourage local governments and the Central Java provincial governments to develop regional resource potential and strengthen financial independence.

Keyword : Regional Financial Independence; Financial Performance; Local Governments; Covid-19 Pandemic; Local Governments

✉ Corresponding author :
Email Address : masyayanbatik@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Penyelenggaraan ini dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap berpegang pada asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tujuan pemberian otonomi luas kepada Daerah adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan terbuka sebagai akibat dari pemberian otonomi daerah. Kemampuan untuk mengelola sumber daya sendiri sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan potensi daerah itu sendiri namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas merupakan manfaat dari pemerintah daerah yang memiliki otonomi ini.

Pemerintah daerah harus memenuhi tuntutan publik untuk pemerintahan yang bersih dengan menyediakan laporan keuangan yang secara akurat meninjau hasil aktual dibandingkan proyeksi, mengevaluasi kinerja, dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan. Laporan aktivitas keuangan membantu mengevaluasi produktivitas dan efektivitas dengan merinci alokasi keuangan dan sumber daya lainnya yang relevan.

Dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya, penilaian kinerja untuk kepentingan umum dapat dijadikan sebagai tinjauan kinerja. Hal ini juga dapat menjadi *benchmark* untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam jangka waktu yang akan datang. Rasio otonomi keuangan daerah, efisiensi, aktivitas, utang, dan pertumbuhan hanyalah sebagian kecil dari rasio-rasio yang dapat dianalisis sebagai bagian dari analisis keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melaporkan perhitungan pendapatan dan belanja APBD (Halim, 2004b).

Di awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda Indonesia memiliki pengaruh di beberapa kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan sektor yang paling terdampak virus ini karena penyebarannya yang cepat di beberapa negara. Setelah sektor kesehatan, ekonomi adalah yang berdampak terbesar. Dampak pandemi terhadap berbagai kegiatan ekonomi telah menimbulkan gangguan yang berdampak pada banyak aspek kehidupan lainnya (Halim, 2012c).

Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 19 dan/atau peraturan perundang-undangan yang menangani ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan/atau sistem keuangan nasional disahkan guna memperkuat kerangka hukum penanganan wabah Covid-19.

Peraturan tersebut memuat sejumlah aturan baru bahkan mengubah sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan keuangan dengan kesehatan dalam upaya memerangi pandemi Covid-19. Salah satu contohnya adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berfungsi sebagai mekanisme desentralisasi konsep otonomi daerah. Pandemi Covid-19 telah mengganggu pelaksanaan APBD yang dikelola pemerintah daerah. APBD saat ini sedang mengalami proses reorientasi dan redistribusi dana, khususnya untuk pos-pos belanja yang mengalami penundaan atau dapat ditunda. Hal ini terutama disebabkan oleh besarnya alokasi sumber daya untuk program bantuan sosial dan belanja modal yang ditujukan untuk mengatasi tantangan

yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, khususnya di bidang kesehatan dan perekonomian (Ihsanuddin, 2020).

Menurut aturan ini, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi yang diambil untuk memenuhi tuntutan dan keadaan saat itu, salah satunya adalah skenario pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja, virus Covid-19 menyebar di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya strategis membelah Pulau Jawa. 121.405 kasus Covid-19 terverifikasi telah dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah, menurut informasi dari situs resmi layanan tanggap darurat Covid-19, corona.jatengprov.go.id (per 26 Januari 2021, pukul 12.00). Dengan banyaknya informasi tersebut, Provinsi Jawa Tengah kini dinilai masuk dalam "zona merah" paparan virus Covid-19.

Menurut laman <https://jatengdaily.com>, perekonomian Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 5,32% atau minus 5,32% (year on year/yoy) pada triwulan III 2020. Sebelumnya sempat negatif 5,94% (yoy) yang dialami pada triwulan kedua tahun 2020. Selain itu, Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat atau negatif selama triwulan kedua dan ketiga tahun 2020 dibandingkan secara keseluruhan. Diprediksi turun menjadi 2,4% dari target awal 5,2% yang direncanakan pada 2020.

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada kerja keuangan pemda Jawa Tengah, terutama dari sisi pendapatan dan belanja yang berubah signifikan. Kebijakan realokasi dan refocusing, serta relaksasi anggaran yang dilakukan sebagai percepatan penanganan dampak Covid-19, belum menunjukkan pengaruh yang cukup besar dalam mendukung penguatan ekonomi di Jawa Tengah pada saat pelaksanaan APBD. Apabila dibandingkan dengan kesamaan tahun sebelumnya, realisasi belanja masih rendah. Realisasi pendapatan, Rp 95.307 miliar (92,55%), kurang dari jumlah yang diproyeksikan dan turun 4,94 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja riil turun 4,78 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 93.265 miliar (85,59%). (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/en/datapublikasi/artikel/3096review-fiscal-regional-tahun-2020.html>)

Pandemi Covid-19 telah berdampak secara negatif pada PAD dan dana perimbangan khususnya di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan penggunaan analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana otonomi fiskal yang dinikmati daerah, sejauh mana pendapatan daerah telah direalisasikan, dan efektivitas penggunaannya. Rasio keuangan daerah yang dihasilkan dapat menjelaskan kemampuan pemerintah daerah di kabupaten dan kota sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dalam menangani permasalahan keuangan.

Meskipun penilaian kinerja keuangan daerah diakui dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program kerja dan kegiatan secara lebih efektif, namun masih sedikit penelitian yang mengkaji rasio kinerja keuangan daerah dan kota sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui secara komprehensif kinerja keuangan daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota pada masa sebelum Covid-19 maupun pada saat pandemi Covid-19. Studi ini menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Analisis kinerja yang digunakan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi keuangan daerah, serta kesesuaian belanja operasional dan kesesuaian belanja modal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara lebih efektif di tahun anggaran mendatang, perbaikan kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pelaksanaan APBD serta memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumenter dengan pendekatan data kuantitatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang disediakan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan secara online (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Informasi yang dikumpulkan meliputi data anggaran, realisasi pendapatan asli daerah (PAD), transfer pusat dan provinsi, target, dan realisasi belanja daerah, khususnya belanja operasional (BO) dan belanja modal (BM) untuk kemudian dilakukan perhitungan statistik dan pengujian hipotesis menggunakan Eviews 12. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji normalitas dan uji beda terhadap rasio kinerja keuangan daerah menggunakan Eviews 12, dengan hasil yaitu :

Tabel 4.11 Uji Beda Kemandirian Keuangan Daerah

Test for Equality of Medians of KEMANDIRIAN_DAERAH
Categorized by values of KODE
.Date: 06/07/23 Time: 23:35
Sample: 2019 2021
Included observations: 105

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		0.207326	0.8358
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		0.207326	0.8358
Med. Chi-square	1	0.076197	0.7825
Adj. Med. Chi-square	1	0.004762	0.9450
Kruskal-Wallis	1	0.044405	0.8331
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	0.044405	0.8331
van der Waerden	1	0.057927	0.8098

Category Statistics

KODE	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
0	35	3.212454	18	52.11429	-0.032111
1	70	3.189939	34	53.44286	0.016055
All	105	3.206418	52	53.00000	8.46E-18

Berdasarkan uji wilcoxon/mann-whitney test pada rasio kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai nilai sig. (signification) 0,8358. Nilai Sig. pada rasio kemandiran keuangan daerah menunjukkan berada di atas level of significance 5 %. Maka dapat disimpulkan keputusan hipotesis adalah menerima H_0 dan menolak H_a yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan rasio kemandirian keuangan daerah pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Jawa Tengah tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif karena alokasi PAD hanya menyumbang sekitar 30 %

dibandingkan pendapatan transfer untuk membiayai operasional pemerintahan. Kemandirian daerah menunjukkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Campur tangan pemerintah pusat ditunjukkan pada alokasi dana transfer yang diterima daerah. Namun, kebijakan campur tangan pemerintah pusat dalam pembiayaan pemerintahan daerah tidak berubah meskipun pandemi Covid-19. Sehingga kinerja keuangan yang dilihat dari kemandirian tidak terdapat perbedaan sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Penelitian Demvi Vebiani dkk., (2022) yang melakukan analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat Covid-19 di Provinsi Jawa Barat menemukan rata-rata PAD mengalami penurunan 6,82 % karena terjadinya penurunan potensi perekonomian dan dana transfer mengalami penurunan 7,99 % karena realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu terdapat upaya intensifikasi PAD yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, meskipun PAD dan dana transfer mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19, namun tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan pada tingkat kemandirian

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Agnika dkk., (2021) terhadap kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah berhasil mengungkapkan beberapa fakta menarik di Kabupaten Subang sebelum dan saat pandemi Covid-19. Temuan tersebut berupa pandemi mengakibatkan kemandirian daerah cenderung rendah karena pemerintah daerah lebih banyak bergantung terhadap bantuan. Di sisi lain, tingkat efisiensi cenderung tinggi karena anggaran mengalami pengalokasian khusus. Namun demikian, tingkat pertumbuhan justru mengalami negative growth. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Habibi dkk. (2021) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan teori kebijakan publik, dimana pemerintah melakukan suatu tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu kebijakan publik.

Tabel 4.12 Uji Beda Desentralisasi Fiskal

Test for Equality of Medians of DESENTRALISASI_FISKAL

Categorized by values of KODE

Date: 06/07/23 Time: 23:50

Sample: 2019 2021

Included observations: 105

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.009441	0.3128
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.009441	0.3128
Med. Chi-square	1	0.933418	0.3340
Adj. Med. Chi-square	1	0.576243	0.4478
Kruskal-Wallis	1	1.025845	0.3111
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	1.025845	0.3111
van der Waerden	1	1.392786	0.2379

Category Statistics

KODE	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
0	35	2.736963	15	48.74286	-0.157453
1	70	2.757668	37	55.12857	0.078727
All	105	2.744726	52	53.00000	-4.23E-17

Berdasarkan uji *wilcoxon/mann-whitney test* pada rasio desentralisasi fiskal menghasilkan nilai nilai *sig. (signification)* 0,3128. Nilai Sig. pada rasio desentralisasi fiskal menunjukkan berada di atas *level of significancy* 5 %. Maka dapat disimpulkan keputusan hipotesis adalah menerima H_0 dan menolak H_a yang artinya tidak dapat perbedaan signifikan rasio desentralisasi fiskal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Berkaitan dengan kemandirian keuangan, hasil penelitian pada rasio desentralisasi fiskal juga menunjukkan hasil yang sama di Jawa Tengah.

Penelitian Demvi Vebiani dkk., (2022) menunjukkan tingkat derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Desentralisasi fiskal pada saat pandemi Covid-19 lebih tinggi 0,003 % dibandingkan dengan sebelum Covid-19. Meskipun secara keseluruhan tingkat desentralisasi fiskal pada kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat masih tergolong kurang baik dalam penyelenggaraan desentralisasi baik sebelum maupun pada saat pandemi Covid-19.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Onibala dkk., (2021) menjelaskan terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengungkapkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan kinerja keuangan namun pengaruh/dampaknya tidak terlalu signifikan. Adapun rasio yang mengalami penurunan tertinggi yaitu kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal pada laporan keuangan tahun 2020.

Rata-rata kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi masih kurang baik karena PAD hanya mampu berkontribusi 20 % dalam membiayai kegiatan pemerintahan di Jawa Tengah. Sehingga menunjukkan kemampuan desentralisasi baik sebelum maupun pada saat pandemi Covid-19 masih dinilai rendah dan dibawah rata-rata standar, dimana daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan desentralisasi jika PAD mampu berkontribusi minimal diatas 30%.

Tabel 4.13 Uji Beda Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Test for Equality of Means of
EFEKTIFITAS_PAD
Categorized by values of KODE
Date: 06/07/23 Time: 23:57
Sample: 2019 2021
Included observations: 105

Method	df	Value	Probability
t-test	103	-0.372940	0.7100
Satterthwaite-Welch t-test*	100.6662	-0.441475	0.6598
Anova F-test	(1, 103)	0.139084	0.7100
Welch F-test*	(1, 100.666)	0.194900	0.6598

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	35	4.691017	0.108415	0.018326
1	70	4.703782	0.187119	0.022365
All	105	4.699527	0.164649	0.016068

Berdasarkan uji *paired t-test* pada rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) menghasilkan nilai nilai *sig. (signification)* 0,7100. Nilai Sig. pada rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan berada di atas *level of significancy* 5 %. Maka dapat disimpulkan keputusan hipotesis adalah menerima H_0 dan menolak H_a yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Rata-rata pemerintah kabupaten dan kota sangat efektif dalam merealisasikan PAD. Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan, baik sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tarjunajah dan Wiratno (2018) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan efektifitas PAD pada pemerintah daerah Jabodetabek dimana seluruh pemerintah Jabodetabek mempunyai rasio efektifitas yang termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Yang membedakan hanya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi terjadi kecenderungan penurunan rasio efektifitas PAD dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2013 dan 2014). Hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Hasil penelitian Demubiani dkk., (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tingkat efektifitas keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Dilihat dari rata-rata tingkat efektifitas keuangan pada saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan sebesar 0,093. Pengelolaan PAD sebelum pandemi sudah dinilai sangat efektif, namun pada saat pandemi Covid-19 menurun menjadi kurang efektif.

Tabel 4.14 Uji Beda Efisiensi Keuangan Daerah

Test for Equality of Medians of
EFISIENSI_KEUDA
Categorized by values of KODE
Date: 06/08/23 Time: 00:02
Sample: 2019 2021
Included observations: 105

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		4.530590	0.0000
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		4.530590	0.0000
Med. Chi-square	1	16.02050	0.0001
Adj. Med. Chi-square	1	14.40607	0.0001
Kruskal-Wallis	1	20.55706	0.0000
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	20.55706	0.0000
van der Waerden	1	16.87274	0.0000

Category Statistics

KODE	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
0	35	4.605520	27	72.05714	0.548028
1	70	4.584111	25	43.47143	-0.274014
All	105	4.591237	52	53.00000	0.000000

Berdasarkan uji *wilcoxon/mann-whitney test* pada rasio efisiensi keuangan daerah menghasilkan nilai nilai *sig. (signification)* 0,000. Nilai Sig. pada rasio efisiensi keuangan

daerah menunjukkan berada di bawah *level of significancy* 5 %. Maka dapat disimpulkan keputusan hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya terdapat perbedaan signifikan rasio efisiensi keuangan daerah pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Agnika dkk., (2021) menyampaikan kinerja APBD Kabupaten Subang berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2019 dan 2020 sebesar 100,27% dan 97,08%. Pada tahun 2019 rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan kinerja keuangan yang tidak efisien, tetapi pada tahun 2020 menjadi efisien. Perubahan tersebut terjadi karena perubahan anggaran pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sehingga realisasi pendapatan dan belanja daerah menurun.

Hasil penelitian Demvi Vebiani dkk., (2022) menunjukkan pengelolaan keuangan sebelum pandemi tergolong kurang efisien dengan belanja daerah sebesar 98% dari total pendapatan daerah. Kemudian menurun menjadi tidak efisien karena belanja daerah yang melebihi total pendapatan daerah sebesar 103%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja Kabupaten Bogor meningkat dibandingkan tahun sebelum Covid-19 yaitu meningkat sebesar 8%, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar minus 6%. Sehingga belanja daerah Kabupaten Bogor lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pada saat pandemi Covid-19.

Efisiensi keuangan dapat diukur dengan membandingkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan daerah dengan biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka menunjukkan semakin tinggi tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Pada saat pandemi Covid-19, potensi perekonomian kabupaten dan kota di Jawa Tengah menurun yang menyebabkan penurunan pada pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah.

Tabel 4.15 Uji Beda Keceragaman Belanja Operasi

Test for Equality of Means of KESERASIAN_BO
 Categorized by values of KODE
 Date: 06/08/23 Time: 00:13
 Sample: 2019 2021
 Included observations: 105

Method	df	Value	Probability
t-test	103	0.325112	0.7458
Satterthwaite-Welch t-test*	73.34074	0.334223	0.7392
Anova F-test	(1, 103)	0.105698	0.7458
Welch F-test*	(1, 73.3407)	0.111705	0.7392

*Test allows for unequal cell variances

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	35	4.233191	0.086851	0.014680
1	70	4.227005	0.094302	0.011271
All	105	4.229067	0.091513	0.008931

Berdasarkan uji *paired t-test* pada rasio keserasian belanja operasi menghasilkan nilai sig. (*signification*) 0,7458. Nilai Sig. pada rasio keserasian belanja operasi menunjukkan berada di atas *level of significancy* 5 %. Maka dapat disimpulkan keputusan hipotesis adalah menerima H_0 dan menolak H_a yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan rasio keserasian belanja

operasi pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.16 Uji Beda Keserasian Belanja Modal

Test for Equality of Means of KESERASIAN_BM
 Categorized by values of KODE
 Date: 06/08/23 Time: 00:17
 Sample: 2019 2021
 Included observations: 105

Method	df	Value	Probability
t-test	103	2.744530	0.0072
Satterthwaite-Welch t-test*	69.03567	2.758484	0.0074
Anova F-test	(1, 103)	7.532443	0.0072
Welch F-test*	(1, 69.0357)	7.609232	0.0074

*Test allows for unequal cell variances

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	35	2.721437	0.281284	0.047546
1	70	2.559989	0.285555	0.034130
All	105	2.613805	0.292940	0.028588

Berdasarkan uji paired t-test pada rasio keserasian belanja modal menghasilkan nilai sig. (signification) 0,0072. Nilai Sig. pada rasio keserasian belanja modal menunjukkan berada di bawah level of significance 5 %. Maka dapat disimpulkan keputusan hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha yang artinya terdapat perbedaan signifikan rasio keserasian belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan rasio keserasian belanja operasi pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 dan terdapat perbedaan signifikan rasio keserasian belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Penelitian tentang tingkat keserasian keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan hasil penelitian Pangkey dkk., (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan tingkat keserasian masih belum seimbang. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat keserasian menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja operasi (rutin) dan belanja modal (pembangunan) secara optimal.

Penelitian Muhammad Alasul Kamal dan Puji Wibowo (2022) menunjukkan pada tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum berkonsentrasi pada

memenuhi belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kecil atau belum terpenuhi.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pada pos PAD, pendapatan daerah, belanja operasi dan belanja modal pada tahun anggaran 2020 mengalami pertumbuhan negatif, padahal pada tahun sebelumnya pertumbuhannya positif. Pos belanja modal menjadi rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan negatif tertinggi yaitu 72,53%. Hal ini dikarenakan belanja modal sebagian anggarannya dialokasikan pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah daerah tidak dapat merealisasikan belanja sesuai target awal. Oleh sebab itu, belanja modal perlu mendapat perhatian khusus dalam tahun anggaran selanjutnya agar pertumbuhan negatif tidak terjadi.

Kondisi yang sama juga terjadi pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dimana belanja modal mengalami realokasi dan pengurangan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19, dan ini terjadi di hampir semua daerah di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tidak terdapat perbedaan signifikan rasio kemandirian keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), keserasian belanja operasi dan terdapat perbedaan signifikan rasio efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dikategorikan pola hubungan konsultatif (persentase 25-50 %) artinya peran pemerintah pusat sudah mulai menurun sebab daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal juga masih rendah (10-20 %), hal ini menggambarkan pemerintah pusat masih memiliki campur tangan yang besar dalam melaksanakan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara efektivitas PAD, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sangat efektif (> 100 %) Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota dapat merealisasikan target penerimaan PAD yang sudah direncanakan baik sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 walaupun secara rata-rata terjadi penurunan PAD. Rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori efisien (< 100 %) yang menjelaskan perbandingan antara pengeluaran jumlah belanja dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Pada saat pandemi Covid-19, semua daerah berupaya melakukan efisiensi belanja karena penurunan pendapatan dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Untuk keserasian belanja operasi dan keserasian belanja modal, secara rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah seimbang dalam mengalokasikan belanja operasi (rutin) dan belanja modal (pembangunan) sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Sebagai implikasi penelitian, diperlukan penguatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan arah pengembangan potensi daerah dan peranan pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan sumber daya daerah yang dimiliki sehingga dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan daerah. Perbaikan kinerja keuangan daerah sangat penting untuk mendorong kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan.

Referensi

Agnika, M., Putra, S. S., & Sudradjat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493-503.

- Halim, A. (2004b). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2012c). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122-147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Ihsanuddin. (2020, Maret 26). 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak Halaman all. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-Covid-19-penangguhan-cicilan>
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35097/32880>
- Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA*, Vol. 5(No.2), 2848-2858.
- Tarjunajah, T., & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 175-187. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.184>
- Vebiani, D., Nugraha, & Hardiana, R. D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 113-126. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/48137%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/download/48137/19563>

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Cyprus University of Technology Student Paper	1%
3	journal.unpar.ac.id Internet Source	1%
4	repository.up.ac.za:8080 Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	jnse.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1%
7	eskripsi.usm.ac.id Internet Source	1%
8	repository.stiesia.ac.id Internet Source	1%
9	ojs.transpublika.com Internet Source	1%

10	www.docstoc.com Internet Source	1 %
11	phd.lib.uni-corvinus.hu Internet Source	<1 %
12	kecamatanmagelangutara.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	jurnal.polgan.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Liberty Union High School District Student Paper	<1 %
15	jurnal.bpk.go.id Internet Source	<1 %
16	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
17	bogordaily.net Internet Source	<1 %
18	jatengdaily.com Internet Source	<1 %
19	jurnal.bppk.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
20	v2.eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

21	Porman Juanda Marpomari Mahulae. "EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2009 s/d 2016 (EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF NORTH SUMATRA PROVINCE PERIOD OF 2009 TO 2016)", Inovasi, 2018 Publication	<1 %
22	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
24	apps.spmb.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
25	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
26	ekonobis.unram.ac.id Internet Source	<1 %
27	Blessiana Keziah Badoa, Chantika Jesica Tesalonika Kumenap. "Pertumbuhan return sektor kesehatan dalam isu melandainya pandemi COVID-19", Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat, 2023 Publication	<1 %
28	Eri Bukhari, Aditya Ramadhan. "ANALISIS KOMPARASI PENGHASILAN DRIVER GO-JEK	<1 %

DAN GRAB TERHADAP STANDAR UPAH
MINIMUM REGIONAL KOTA BEKASI PADA
SAAT PANDEMI COVID-19", Jurnal Ilmiah
Akuntansi dan Manajemen, 2020

Publication

29

Pesi Suryani, Lasando Lumban Gaol, Eka
Wirajuang Daurrohmah. "Analysis of
relaxation of local government budgeting on
the achievement of the Bengkulu City
government's key performance indicators
during the covid-19 period", Entrepreneurship
Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA), 2023

Publication

<1 %

30

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

31

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

32

journal.stmikjayakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

33

jrssem.publikasiindonesia.id

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Keimyung University

Student Paper

<1 %

35

docplayer.biz.tr

Internet Source

<1 %

36	journal.fkm.ui.ac.id Internet Source	<1 %
37	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
38	techsitezambia.org Internet Source	<1 %
39	ejournal.widyamataram.ac.id Internet Source	<1 %
40	infokaltim.com Internet Source	<1 %
41	jurnalku.org Internet Source	<1 %
42	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
43	Alfiah Hasanah, Donny Hardiawan, Jefani Marrosa, Adlan Ramadhan et al. "Behavioral Changes in Accessing Outpatient Care During the Covid-19 Pandemic", Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 2021 Publication	<1 %
44	Moningka Tesalonika, Agus T. Poputra, Lidia Mawikere. "ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SUMBER	<1 %

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA", GOING
CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016

Publication

45 Rani Velia Salsabilla, Iskandar Ali Alam. <1 %
"Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor
Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Bandar Lampung", Jurnal
EMT KITA, 2023
Publication

46 bagaimanatum.blogspot.com <1 %
Internet Source

47 data.jatengprov.go.id <1 %
Internet Source

48 ejournal.gunadarma.ac.id <1 %
Internet Source

49 ejournal.unikama.ac.id <1 %
Internet Source

50 eprints.stiebankbpdjateng.ac.id <1 %
Internet Source

51 infor.seaninstitute.org <1 %
Internet Source

52 jaa.unram.ac.id <1 %
Internet Source

53 repository-feb.unpak.ac.id <1 %
Internet Source

54

tr.scribd.com

Internet Source

<1 %

55

www.aldp-papua.com

Internet Source

<1 %

56

www.msn.com

Internet Source

<1 %

57

DAIS SOLIHAT. "PENGARUH PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH", Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah, 2018

Publication

<1 %

58

Riyans Ardiansyah. "DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH", Jurnal Manajemen dan Profesional, 2023

Publication

<1 %

59

Yohanes Suhardjo. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA SEMARANG)", Solusi, 2019

Publication

<1 %

60

Megia Wulandari, Anggraini Yunita, Julia. "Analisis Perbedaan Kebijakan Pembayaran

<1 %

Dividen Pada Perusahaan Yang Menerapkan Board Diversity Dengan Proyeksi Woman On Board (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2021)", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2023

Publication

61	diyahatika.wordpress.com	<1 %
Internet Source		

62	pkn4all.blogspot.com	<1 %
Internet Source		

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On